



## Sebagian PKL Datangi DPRD DIY

**YOGYA (KR)** - Sebagian Pedagang Kaki Lima (PKL) mendatangi DPRD DIY, Rabu (26/1). Mereka kembali menyuarakan agar relokasi PKL Malioboro ditunda sampai setelah Lebaran 2023 nanti.

Kedatangan mereka ini berbarengan dengan audiensi Pansus DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka pengayaan materi mengenai pengawasan relokasi PKL Kawasan Malioboro. Sekda DIY Baskara Aji hadir sebagai wakil dari Pemda DIY. Audiensi ini juga untuk

mendengar usulan dan temuan dari Pansus PKL yang dibentuk DPRD Kota Yogyakarta.

Begitu sampai di DPRD DIY, sejumlah perwakilan PKL langsung menduduki halaman kantor. Mereka menggelar doa bersama dan tak lupa sejumlah spanduk maupun poster. Seperti 'Relokasi mundur sehabis lebaran tahun 2023', 'Nasib pendorong gerobak mau dikemanakan' hingga 'Beri kami waktu'.

**\* Bersambung hal 7 kol 1**

## Sebagian

Sambungan hal 1

"Kami tidak menolak relokasi. Kami hanya minta ditunda terlebih dahulu. Karena kami ini sedang berusaha pulih akibat pandemi. Saat ini kondisi kami masih terpuruk," kata Yati salah satu PKL.

Selain minta agar ditunda, PKL juga meminta agar ada perbaikan lapak yang telah disiapkan di lokasi relokasi. "Ini tidak layak karena terlalu sempit," ujar Ketua Paguyuban PKL Malioboro Handayani, Sogi Wartono.

Ketua Pansus DPRD Kota Yogyakarta, Foki Ardianto mengatakan, kedatangan tim ke DPRD DIY sekaligus memaparkan



KR-Atiek Widyastuti H

**Para PKL Malioboro mendatangi Gedung DPRD DIY, meminta penundaan relokasi.**

tentang hasil rapat dengan Pemkot dan rapat dengar pendapat umum. Termasuk pembahasan perihal kewenangan dari PKL Malioboro. "Pak Sekda menyatakan, tim penanganan relokasi dibentuk sesuai SK Gubernur. Dimana di dalamnya ada dari Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY. Dari SK ini saya menilai kedua pihak seakan-akan saling lempar tanggung jawab soal kewenangan," katanya.

Wakil Komisi B DPRD DIY RB Dwi Wahyu meminta agar Pemda DIY benar-benar memiliki konsep jelas tentang hal ini. Seperti wisatawan mau diarahkan masuk ke Teras Malioboro hingga barang yang dijual toko harus benar-benar sesuai izin.

"Paling penting, harus ada kepastian tidak ada PKL baru yang masuk. Dan toko-toko harus sesuai dengan izin. Barang apa saja yang akan dijual. Jangan sampai ada izin baru. Harus jadi perhatian ini," katanya.

Sekda Kadarmanta Baskara Aji mengatakan proses relokasi PKL ke eks Gedung Bioskop Indra dan eks Kantor Dinas Pariwisata DIY tidak akan ditunda-tunda lagi. Pihaknya menjamin setelah ini Malioboro benar-benar bersih dari PKL termasukantisipasi kemungkinan akan adanya pedagang baru.

"Sudah tidak ditunda-tunda lagi. Mau sekarang atau besok juga tetap hari pertama. Pemindahan tetap bertahap, tapi yang jelas tidak akan ada penundaan lagi. Jumlah pedagangnya tidak ada perubahan, 1.838 PKL. Kami jamin tidak ada PKL yang beroperasi di Malioboro," tegasnya. (Awh)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 04 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005